

**AKAD JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN DARI KAWASAN HUTAN  
LINDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok  
Lampung selatan)



**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**DARLI SAPUTRA**

**NPM : 1521030035**

**Program Studi : Muamalah**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 2019 M/1440 H**

**AKAD JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN DARI KAWASAN HUTAN  
LINDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

(Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok  
Lampung selatan)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH :**

**DARLI SAPUTRA**

**NPM : 1521030035**

**Program Studi : Muamalah**

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 2019 M/1440 H**

## ABSTRAK

### AKAD JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN DARI KAWASAN HUTAN LINDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan)

Oleh:  
Darli Saputra

Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok terdapat banyak penduduk yang telah bertempat tinggal di kawasan tersebut dengan alasan bahwa penduduk tersebut telah menduduki kawasan itu sejak puluhan tahun lalu. Perihal tersebut melanggar UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pada Pasal 50 Ayat 3 Huruf a. Sebenarnya Masyarakat dapat melakukan perkebunan dengan masuk ke dalam kategori perhutanan sosial dalam skema hutan kemasyarakatan sesuai dengan PERMENLHK No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Dimana masyarakat harus memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm) dengan cara petani harus mendaftarkan diri kepada pemerintah dengan menunjukkan KTP dan melaporkan lahan yang digunakan dan jenis tanaman serta membayar jasa pengukuran lahan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan dan Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan alasan metode kualitatif bersifat deskriptif analisis. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm) Sehingga Melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PERMENLHK No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016. Menurut Hukum Islam Jual beli hasil perkebunan seperti ini objeknya tidak memenuhi syarat dalam jual beli dan penjual tidak menaati ulil amri dan Menurut Hukum Positif tidak diperbolehkan dikarenakan penjual selaku penggarap lahan hutan lindung sebagai perkebunan telah melanggar peraturan perundangan-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung tidak memenuhi syarat dalam jual beli atau jual beli ini dilarang.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung*

**PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Darli Saputra  
NPM : 1521030035  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung register 17, Batu Serampok, Lampung Selatan)**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Bandar Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum**  
**NIP. 197005022000032001**

**Pembimbing II**

  
**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011024**

**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Dr. H. A. Khumedi Jafar, S.Ag., M.H**  
**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Let. Kol. Hi, Endro Suratmin Sukarame/ Telp ( 0721 ) 703260 Bandar Lampung*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung register 17, Batu Serampok, Lampung Selatan) disusun oleh Darli Saputra NPM. 1521030035 Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juni 2019.**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Dr. H. Khoirul Abror, M.H**

**Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I, M.Ag**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H, M.A**

**Penguji II : Dr. Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Dr. Almasyah, S. Ag, M. Ag**

**NIP. 197006011997031002**



*(Signature of Khoirul Abror)*  
*(Signature of Arif Fikri)*  
*(Signature of Maimun)*  
*(Signature of Erina Pane)*



## MOTTO

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ..... <sup>قل</sup>

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(Q.S. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ  
تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),  
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang  
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),  
jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian  
itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S. An-Nisa:59)

## PERSEMBAHAN

Ya Allah, Terima kasih atas nikmat dan rahmat-Mu yang agung ini, Ditengah malam aku bersujud, kupinta kepada-Mu disaat aku kehilangan arah, kumohon petunjuk-Mu disaat aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus kutelan antara keringat dan air mata, namun aku tak pernah takut, aku takkan pernah menyerah karena aku tak mau kalah, akan terus melangkah berusaha dan berdoa tanpa mengenal putus asa. Syukur alhamdulillah, Kini aku tersenyum dalam iradat-Mu, kini baru ku mengerti arti kesabaran dalam penantian, sungguh tak kusangka ya Allah, Kau menyimpan sejuta makna dan rahasia, sungguh berarti hikmah yang Kau beri, kupersembahkan karya ilmilah (skripsi) ini kepada:

- Ayahku tercinta Das'at Majid, Kini kau telah meninggalkan dunia ini. kau telah begitu kuat dan tegar dalam menghadapi hidup ini, kau telah jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat meraih cita-cita, hari-harimu penuh tantangan dan pengorbanan, ayah sungguh kau pelita dalam hidupku.
- Ibuku tersayang Sutini, kau kirim aku kekuatan lewat untaian kata-kata dan iringan doa. Ibu, kau besarkan aku dalam dekapan hangatmu, cintamu hiasi jiwaku dan restumu temani kehidupanku.
- Kakak pertamaku tercinta, Dedi Marhedi, kakak iparku Desi Astuti, Kakak keduaku Recky Chandra, S.P, M.Si, kakak iparku Fatimah Azzahra Kertamuda, S.Pd, M.Pd, Kakak ketigaku Beni Sanjaya, S.E, serta keponakanku tersayang Qonita Salsabila dan Qodiba Syakilla yang telah memberikan dukungan, perhatian, support, semangat yang luar biasa kepadaku selama ini.
- Almamater UIN Raden Intan Lampung Tercinta.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Darli Saputra, dilahirkan di Menggala, pada hari Selasa, tanggal 05 November 1996. Putra bungsu atau putra ke-empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Das'at Majid dan Ibu Sutini. Adapun pendidikan yang pernah ditempuh sebagai berikut:

1. Taman kanak-kanak di TK Al-Hidayah Menggala tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003;
2. Sekolah Dasar di MIN 1 Menggala pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2009;
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMP Negeri 1 Menggala pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012;
4. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di SMA Negeri 2 Menggala pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015.
5. Selanjutnya melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) tahun 2015 sampai dengan sekarang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “**Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif** (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung register 17, Batu Serampok, Lampung Selatan)” dapat diselesaikan. Dan shalawat berserta salam disampaikan kepada Rasulullah SAW, para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas bantuan semua pihak yang membantu baik bantuan materil dan immateril dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa;
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja’far S.Ag. M.H. dan bapak Khoiruddin M.S.I selaku ketua dan sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum selaku pembimbing I dan bapak Frenki, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan demi selesainya skripsi ini;
4. Tim Penguji Ujian Munaqosyah yang terdiri dari Dr. H. Khoirul Abror, M.H selaku ketua, Arif Fikri, S.H.I, M.Ag selaku sekretaris, Dr. Maimun, S.H,M.A selaku penguji I dan Dr. Hj. Erina Pane, S.H, M.Hum selaku penguji II;
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung;

6. Kepala perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung dan Fakultas Syari'ah serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain;
7. Bapak Reki Candra, S.P, M.Si selaku Koordinator Lapangan dari KPH Gn. Rajabasa-Way Pisang-Batu Serampok serta Bapak/Ibu Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai;
8. Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidikmisi (AMPIBI) UIN Raden Intan Lampung khususnya Angkatan 2015;
9. Ikatan Keluarga Mahasiswa Muslim Tulang Bawang (IKAMM TUBA);
10. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu keluarga besar Muamalah F Angkatan 2015;
11. Rekan-rekan KKN 270 di Desa Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
12. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung;

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan, kemampuan dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

Akhirnya, diharapkan skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu dibidang hukum dan keislaman..

Bandar Lampung, 09 Februari 2019

Penulis,

**Darli Saputra**  
NPM. 1521030449



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang .....	3
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Kegunaan hasil Penelitian .....	8
G. Metode Penelitian .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	16
1. Pengertian Akad Jual Beli .....	16
2. Dasar Hukum Akad Jual Beli .....	19
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli .....	23
4. Macam-macam Akad Jual Beli .....	32
5. Akad Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....	34
B. Jual beli Menurut Hukum Positif .....	43
1. Pengertian Jual Beli .....	43
2. Syarat-syarat Jual Beli .....	45
3. Subjek dan Objek Jual Beli .....	49
4. Macam-macam Jual Beli .....	52
5. Hak Konsumen dalam Jual Beli .....	54
C. Landasan Kehutanan .....	57
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan .....	57
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.83/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial .....	60

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan.....	70
B. Praktik Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan.....	77

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Terhadap Praktik Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Register 17.....	80
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Register 17 .....	84

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Skripsi ini memerlukan penegasan judul dalam upaya memudahkan dalam memahami skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul yaitu **“Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan)”**. Adapun istilah-istilah pada judul skripsi tersebut yang perlu diuraikan sebagai berikut:

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.<sup>1</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>2</sup>

Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri atas produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat* (Penerbit Amzah : Jakarta, 2015), h. 84.

<sup>2</sup>A. Khumedi Ja, far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h.140.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 786,

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>4</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>5</sup>

Hukum Positif adalah kumpulan atau kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku yang bersifat mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>6</sup>

Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan adalah sebagai penegasan batasan lokasi penelitian praktik akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung.

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas, yang dimaksud dengan penelitian ini adalah sebuah penelitian tentang “Akad Jual Beli Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan Lindung Perspektif Hukum Islam dan Hukum positif (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok Lampung Selatan).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang mendasari sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat 8.

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, (Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 2001), h. 5.

<sup>6</sup>W.J.S Poedarminta, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 370.



1. Alasan Objektif bahwa masalah yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok melakukan perkebunan di kawasan hutan lindung. Jika hasil perkebunan yang dilakukan masyarakat di kawasan hutan lindung tanpa perizinan pemerintah maka secara tidak langsung akan merugikan masyarakat dan pemerintahan.
2. Alasan subjektif adalah judul skripsi ini relevan sesuai dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung khususnya jurusan Muamalah.

### C. Latar Belakang

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.<sup>7</sup>

Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok secara geografis, kawasan Hutan Lindung Batu Serampok berada pada posisi 105° 19' 55" BT - 105° 27' 33" BT dan 5° 26' 48" LS - 5° 32' 14" LS. Dan mempunyai luas wilayah 7.230 Ha. Secara pengelolaan merupakan wilayah kerja UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Rayon III.<sup>8</sup>

Kawasan hutan lindung ini banyak penduduk yang telah bertempat tinggal dengan alasan bahwa penduduk tersebut telah menduduki sejak puluhan tahun lalu di kawasan hutan ini. Padahal menurut UU No. 41 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat (8).

<sup>8</sup>Data-Data KPH (Kesatuan Pengelola Hutan)Gn. Rajabasa-Way Pisang-Batu Serampok.

Kehutanan, Pada pasal 50 ayat 3 huruf a menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”.<sup>9</sup>

Didalam Islam, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.S. An-nisa’ (4):59).<sup>10</sup>

Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ  
وَكْرَهُ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخارى)

“Dari Ibn Umar ra., dari Nabi SAW, Sesungguhnya beliau bersabda : “Seorang Muslim wajib mendengar dan taat terhadap perintah yang disukai maupun tidak disukainya. Kecuali bila diperintahkan mengerjakan kemaksiatan, maka ia tidak wajib mendengar dan taat”(HR. Bukhari)<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3 huruf a).

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet.VIII* (Bandung: Diponegoro, 2008), h.43

<sup>11</sup>Luthfi Badruzzaman, *Shahih Bukhori Penerjemah Imam Hakim* (Jakarta: Quantum Iklas, 2015) h. ٧٦٣

Pada era modern seperti saat ini dimana semua cara dalam bertransaksi atau bermuamalah bisa dihalalkan oleh seorang manusia yang tidak tahu akan hukum-hukum Islam. Islam dapat diterapkan setiap waktu dan tempat sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Suatu bentuk transaksi yang tercela karena adanya pemerasan, penipuan, pemaksaan atau merugikan orang lain atau pihak lain walaupun transaksi tersebut diluar riba maka hukumnya tetap haram.

Untuk itu, suatu perdagangan atau transaksi harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Seiring dengan perkembangan zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli menjadi beraneka ragam dalam cara maupun bentuk. Walaupun terkadang cara yang dilakukan belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Salah satunya adalah jual beli hasil perkebunan dari kawan hutan lindung.

Masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk budidaya tanaman perkebunan yang bersifat musiman yang tersebar luas merupakan kombinasi tanaman perkebunan cengkeh, kemiri, pala, aren dan durian. Budidaya tanaman perkebunan ini dilakukan rata-rata di dataran tinggi sekitar 500-800 m di atas permukaan laut. Pemanenan hasil budidaya tanaman perkebunan dua kali setiap tahun dan dijual ke kota. Hasil dari penjualan tanaman tersebut oleh masyarakat untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Padahal masyarakat yang melakukan budidaya perkebunan seharusnya masuk ke dalam kategori kehutanan sosial dalam skema hutan kemasyarakatan.<sup>12</sup> Di mana petani harus mendaftarkan diri

---

<sup>12</sup>Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Hutan Kemasyarakatan No.P.88/Menhut-II/2014.



kepada pemerintah dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan melaporkan lahan yang digunakan dan jenis tanaman serta harus dilakukan pengukuran lahan oleh lembaga dengan biaya yang disepakati.

Untuk kepentingan pengelolaan hutan agar terwujudnya keberlangsungan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial, seluruh kawasan hutan akan dibagi menjadi unit-unit kewilayahan dalam skala manajemen tingkat dalam bentuk KPH (Pasal 17 UU No 41 Tahun 1999). KPH dirancang sesuai dengan fungsi hutan dan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 dalam UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hutan mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi maka KPH dibentuk mengikuti nomenklatur tersebut sehingga terdapat tiga bentuk KPH, yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).<sup>13</sup>

Sistem pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dicanangkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2001 yang dikenal dengan Hutan Kemasyarakatan (HKm) membuka kesempatan bagi masyarakat desa hutan untuk terlibat aktif dalam pengelolaan hutan. Dalam sistem Hutan Kemasyarakatan (HKm) ini dilakukan proses pemberdayaan kepada masyarakat desa yang berada didalam dan sekitar hutan yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan sumber daya hutan yang lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan. Permasalahan secara khusus yang muncul di dalam pengelolaan kawasan hutan KPH Batu Serampok, antara lain:

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat (1)

1. Terdapat perbedaan persepsi dan kepentingan antar *stake holder* terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan. Hal ini berdampak pada belum terintegrasinya program/kegiatan pengembangan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dilaksanakan oleh berbagai *stakeholder*.
2. Belum mantapnya unit pengelolaan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) karena beberapa faktor seperti kondisi kepemilikan Hutan Kemasyarakatan perkepalakeluarga dan belum meratanya kemampuan teknis maupun manajerial pengelolaan kawasan hutan para petani hutan desa.
3. Paket teknologi dan kelembagaan dalam pengembangan hutan kemasyarakatan difokuskan untuk mengkaji aspek kelembagaan dan teknologi hutan kemasyarakatan di dalam kawasan hutan di luar kawasan hutan.

Berdasarkan argumen tersebut di atas, masalah ini layak untuk diteliti lebih lanjut. Alasannya, penulis ingin mengetahui praktik akad jual beli yang dilakukan masyarakat tersebut dalam hukum Islam dan masyarakat untuk mengetahui dan menaati peraturan pemerintahan/peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah praktik akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam (Muamalah) dan hukum positif terhadap akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Ada beberapa kegunaan hasil penelitian skripsi ini yaitu dari aspek teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekaligus penerapan terkait dengan akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan.
- b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkannya ditemukan suatu kepastian hukum mengenai praktik akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung sehingga dapat memberikan pemahaman yang baru dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta



pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan kemaslahatan umum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan ataupun yang terjadi di tempat-tempat lainnya.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami jual beli secara baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang jual beli dalam literatur kepustakaan di bidang studi Ilmu Hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syariah.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah cara atau upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Metode kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>14</sup>

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat register 17 Batu Serampok tentang akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok Lampung Selatan.<sup>15</sup>

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-dokumen tentang apa saja yang terkait dengan pembahasan ini.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

<sup>15</sup>Muhammad Prabunda T, *Metodologi Riset*(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sejumlah manusia, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek penelitian.<sup>17</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 168 orang yang terdiri dari 168 warga penggarap perkebunan atau penjual.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.<sup>18</sup> Untuk menentukan ukuran sampel, menggunakan rumusan sampel yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka diambil seluruhnya sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika besar subjeknya melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dari penelitian ini melebihi dari 100 orang maka populasi tersebut diambil sebanyak 10% sehingga jumlah sampelnya adalah  $15\% \times 168 \text{ orang} = 17 \text{ orang}$ .<sup>19</sup> Penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik sampling non random sampling. Di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan

---

<sup>17</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Fakultas Teknologi UGM (Yogyakarta: UGM Press, 1986), h.27.

<sup>18</sup>Sutrisno, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan R&D*(Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009), h.120.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013). h.198.



penelitian, antara lain 1 orang koordinator lapangan Gapoktan HKm Hutan Tua di kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok wilayah Kerja KPH Unit XIII Gn. Rajabasa-WayPisang-Batu Serampok dan 3 orang pembeli.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara atau dalam istilah lain disebut interview yaitu suatu cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>20</sup> Artinya penulis memperoleh informasi langsung dari penggarap atau penjual, pengepul atau pembeli dan koordinator lapangan Gapoktan HKm Hutan Tua di kawasan hutan lindung register 17 Batu Serampok wilayah Kerja KPH Unit XIII Gn. Rajabasa-WayPisang-Batu Serampok dengan melakukan tanya jawab.

##### **b. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.<sup>21</sup> Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi sosial dari masyarakat yang berada di hutan lindung tersebut sehingga mendapatkan data mengenai

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 137.

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 145.

implementasi akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek tentang praktik akad jual beli hasil perkebunan di kawasan hutan negara.

## 5. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data dari lapangan atau penulisan terkumpul maka menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

### a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian dilapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

### b. Sistematis Data (*Systematizing*)

Yaitu melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Muhammad Prabundu Tika, *Op.cit*, h.63

<sup>23</sup>*Ibid*

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabar ke dalam unit-unit, melakukan intesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>24</sup>

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman, yang mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.<sup>25</sup>

Komponen dalam analisis data sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

### b. Penyajian data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 329.

<sup>25</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan RAD*(Bandung : Alfabeta, 2008., cet. IV), h. 244.



**c. Verifikasi atau penyimpulan data**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid*, h.252

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad Jual Beli

Akad adalah menghubungkan suatu kehendak suatu pihak dengan pihak lain dalam suatu bentuk yang menyebabkan adanya kewajiban untuk melakukan suatu hal.<sup>1</sup> Dan menurut kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan perikatan) dan kabul (pernyataan menerima perikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>2</sup> Akad pula dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu unsur-unsur yang bergantung padanya keberadaan suatu akad itulah yang disebut sebagai rukun.<sup>3</sup>

Jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti “*al-bai*” yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba’i*, *al-tijarah*, dan *al-mubaddalah*.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat* (Penerbit Amzah : Jakarta, 2015), h. 84

<sup>2</sup>Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Al adalah*, Vol. 12 No 2 2015. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015). (online). tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. (1 November 2018). h. 786.

<sup>3</sup>Muhammad Maksum. “Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah”. *Jurnal Al-’Adalah*, Vol. 12 No. 1 2014. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2014), (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>. (29 Maret 2019). h. 50.

<sup>4</sup>Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 67

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ  
سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan tijarah (perniagaan) yang tidak akan merugi.” (Q.S. Fathir (35) : 29).<sup>5</sup>

Secara istilah (terminologi) terdapat beragam definisi jual beli, sekalipun memiliki substansi dan tujuan yang sama antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam yaitu:

1) Definisi dalam arti umum

Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

2) Definisi dalam arti khusus

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara khusus.<sup>6</sup>

b. Menurut ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam yaitu:

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Cet. VIII* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 437

<sup>6</sup>Abdurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah, Juz II* (Beirut: Darul kutub Al-Ilmiah, 1990), h. 134

1) Jual beli dalam arti khusus

Jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

2) Definisi dalam arti umum

Jual beli adalah akad muawadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan hutang.<sup>7</sup>

c. Menurut Ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktek jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.<sup>8</sup>

d. Menurut Ulama Hanabilah, Jual Beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan definisi menurut para Imam Mazhab diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa secara redaksional berbeda-beda tetapi secara substansial sama bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai/harga atas dasar ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 135

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Muhammad Al-Kitab al-syarbini, *Maghi al-muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani al-fadz al manhaj*, Juz 2 (Beirut : Dar al kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 320



## 2. Dasar Hukum Akad Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Diantara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>١٠</sup>

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)<sup>10</sup>

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama di peroleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar, musibah yang kelam dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 47

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721

<sup>12</sup>Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ<sup>ج</sup>

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa (4): 29)<sup>13</sup>

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir atau judi) maupun transaksi yang mengandung unsur gharar. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan (keridhaan) antara penjual dan pembeli.<sup>14</sup>

#### a. Berdasarkan Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصحها حاكم)

<sup>13</sup>Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 83

<sup>14</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010),

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: “Apakah Profesi yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri dan setiap jual beli yang mabrur”. (H.R. Al-Barzaar dianggap shohih oleh Al-Hakim).<sup>15</sup>

Jual beli mabrur adalah jual beli yang mengandung dua unsur yaitu jujur dan menjelaskan. Jujur terkait keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal tidak atau tahu ada cacat pada produknya namun ditutupi. Di samping dua unsur di atas ada unsur ketiga yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli yang terjadi tergolong mabrur yaitu sesuai dengan syariat.<sup>16</sup>

#### b. Ijma’

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan apabila di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat dikarenakan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>17</sup> Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: “Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah halal dan diperbolehkan (ibadah) kecuali/sampai ada dalilnya (yang melarangnya)”.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Alami, 1995), h. 303

<sup>16</sup> Aris Munandar, “Jual Beli Mabrur”, tersedia di :<https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fiqh-perdagangan-1890.html>. (1 November 2018)

<sup>17</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75

<sup>18</sup> Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h.59-60

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan sehingga prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah ada prinsip muamalah yaitu:

- 1) Prinsip kerelaan;
- 2) Prinsip bermanfaat;
- 3) Prinsip tolong-menolong;
- 4) Prinsip tidak melarang.

Berdasarkan kandungan firman Allah SWT, Sunnah/Hadist Rasulullah SAW, dan Ijma' diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Beda dengan Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *fiqh muamalah* bahwa jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak (minuman keras) atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak (minuman keras) walaupun pembeli adalah orang kafir.<sup>19</sup> Jadi hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi hukumnya

---

<sup>19</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89

bisa berubah menjadi wajib, makruh, mahdub bahkan bisa menjadi haram pada situasi tertentu.<sup>20</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

#### a. Rukun Akad Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja, menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>21</sup> Menurut jumhur ulama rukun akad jual beli ada empat sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - a) Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf);
  - b) Pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> EN Rachmawati, *Op.Cit*, h. 578

<sup>21</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 118.

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 119.



## 2) Sighat

Sighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima) baik transaksi menyerahkan barang lisan ataupun tulisan.<sup>23</sup>

## 3) Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>24</sup>

## 4) Ada nilai tukar pengganti barang



Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).<sup>25</sup>

## b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2016), h. 104.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>25</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam* (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015), h. 249.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h.119.

1) Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Cakap melakukan tindakan hukum (Baligh dan berakal).

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.<sup>27</sup> Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa (4): 5).<sup>28</sup>

Orang yang belum sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Baligh menurut hukum Islam (fiqih) dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid/menstruasi) bagi anak perempuan. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang

<sup>27</sup> A. Khumedi Ja'far, *Loc. Cit.*,

<sup>28</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 77

dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian anak-anak sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid/menstruasi) menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>29</sup>

- b. Atas dasar suka sama suka yaitu dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain sehingga pihak lain dapat melakukan transaksi jual beli dengan kehendak sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....(Q.S. An-Nisa (4): 29)<sup>30</sup>

<sup>29</sup> A. Khumedi Ja'far, 2016, *Op. Cit.*, h. 105-106.

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 83

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu jual beli secara paksa menjadi sah atas dasar pertimbangan umum/ kepentingan orang lain (Maslahat) misalnya hakim memutuskan suatu perkara untuk menjualkan harta seseorang tersebut untuk menyelesaikan utang-utangnya.

- c. Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Maksudnya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.<sup>31</sup>

- d. Keduanya tidak mubazir.

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Isra' Ayat 27.

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.

<sup>31</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 120

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli dan sewa menyewa.<sup>32</sup> Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal;
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Contohnya: “saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga sepuluh ribu”;
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik atau masalah yang sama;
- d) Janganlah diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.<sup>33</sup>

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli sebagai berikut:

- a) Barang itu ada atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7



- b) Suci atau bersih barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najid atau yang diharamkan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammd SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ  
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>35</sup>

Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai

<sup>34</sup>A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2015), h. 148

<sup>35</sup>Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori, No. Hadist* 2011, h. 813 dan *Muslimbinal-Hajjajal-Qasyairian-Naisaburi, Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 210

pupuk tanaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli asalkan pemanfaatan barang tersebut bukan untuk keperluan dikonsumsi.<sup>36</sup>

- c) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayuran, dan lain-lain), untuk dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), untuk dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti seekor anjing untuk berburu.

- d) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya barang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Kepemilikan dalam fiqh muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

---

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h. 46

(1) *Milk Tam*, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai;

(2) *Milk Naqish*, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan)nya saja tanpa memiliki zatnya.<sup>37</sup>

e) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dengan demikian barang yang di dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

f) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui artinya barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

---

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 40

- g) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, artinya barang atau benda diperjualbelikan tidak boleh dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.<sup>38</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad Jual Beli

Di tinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:<sup>39</sup>

##### a. Jual beli benda terlihat

Jual beli benda terlihat atau dapat dibuktikan adalah jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti menjual beras di pasar.

Bentuk jual beli yang demikian ini diperbolehkan. Sebagaimana Imam Taqiyuddin menegaskan apabila akad terjadi terhadap sesuatu barang yang dijelaskan maka jual beli adalah sah. Apabila barang yang diperjualbelikan ada kekurangan atau cacat dan agar jual beli yang dilakukannya itu tetap diperbolehkan maka seseorang penjual harus menjelaskan barang yang cacat itu.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>A. Khumedi Ja'far, 2016, *Op. Cit.*, h. 108-109

<sup>39</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shaleh), Penerjemah K.H Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa, Bagian Pertama, Cet. Ke-2 (Surabaya: Bina Iman, 1995), h. 539

<sup>40</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 71

b. Jual beli barang yang masih diperjanjikan atau ditangguhkan.

Hal yang demikian ini disebut dengan jual beli salam dan istishna. Salam adalah untuk jual beli tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Sedangkan jual beli Istishna, jika pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan maka hukumnya mengikat. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>41</sup>

c. Jual beli barang yang tidak dapat dibuktikan atau dilihat.

Jual beli benda yang tidak dapat dibuktikan atau dilihat barangnya adalah jual beli yang dilarang syara' karena barang yang menjadi objek belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari hasil curian atau merupakan barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.<sup>42</sup>

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan

---

<sup>41</sup>Imam Taqiyuddin, *Op. Cit*, h. 540

<sup>42</sup>*Ibid*



pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.<sup>43</sup>

•Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu mejelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>44</sup>

## 5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahtahal Al-Juhaili membagi menjadi tiga macam sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 78

<sup>45</sup>A. Khumedi Ja'far, 2016, *Op. Cit.*, h. 111

a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad (Penjual dan Pembeli):


1) Jual beli Fudhul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

2) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

3) Jual beli Mulja'



Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.<sup>46</sup>

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan) antara lain:

1) Jual beli Gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Jual beli yang demikian tidak sah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

---

<sup>46</sup>*Ibid*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّمَاكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زَيْدٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرُورٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Mewartakan Muhammad Bin Samak dari Yazid Bin Abi Ziyad dari Al-Musayyabin Rafi’ dari Abdullah Bin Mas’ud berkata: telah bersabda Rasulullah Saw, jangan kamu beli ikan yang berada dalam air, karena itu adalah sesuatu yang tidak jelas”.(H.R. Ahmad)<sup>47</sup>

## 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

## 3) Jual beli majhul

Yaitu jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadist 3576, Juz 4, h. 37

<sup>48</sup>A. Khumedi Ja’far, 2016, *Loc. Cit.*

4) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Uman ra berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual sperman (mani) binatang”. (HR. Bukhori)<sup>49</sup>

5) Jual beli barang yang najis dan terkena najis.

Maksudnya bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah ra, bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun Fathu Makkah, dan Ia di Makkah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Shahih Bukhori, No. Hadist 2011, h. 820

<sup>50</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit*, h. 826 dan Muslim binal-Hajjajal-Qasyairian-Naisaburi, *Op. Cit*, h. 216

Para ulama sepakat tentang larangan jual beli barang seperti ini disamakan seperti khamr. Akan tetapi ada perbedaan pendapat tentang barang yang terkena najis (al-mutanajis) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>51</sup>

6) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.

Jual beli yang demikian itu adalah haram. Sebab brangnya belum ada dan belum tampak jelas. Hal ini sebagaimana sabda Nabi

SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar RA mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli janin (hewan) yang masih ada dalam perut induknya “. (H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>52</sup>

7) Jual beli Muzabanah

Yaitu jual beli yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu, jual beli seperti ini dilarang. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

<sup>51</sup>Rachmat Syafei, *Op. Cit.*, h. 151

<sup>52</sup>Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz II, h. 2



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ  
وَالْمُخَاصَرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli Muhaqallah, Mukhadharah, Mulamassah, Munabazah dan Muzabanah”. (H.R. Bukhori dan Muslim).<sup>53</sup>

#### 8) Jual beli Muhaqallah

Yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba didalamnya (untung-untungan).

#### 9) Jual beli Mukhadharah

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut samar (belum jelas) sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.

#### 10) Jual beli Mulammasah

Yaitu Jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai) maka ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

<sup>53</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, *Op. Cit*, h. 828 dan Muslim binal-Hajjajal-Qasyairian-Naisaburi, *Op. Cit*, h. 218

### 11) Jual beli Munabadzah

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seorang berkata: lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lemparkan kepadamu apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar-melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama dikarenakan mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>54</sup>

#### c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul)

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh pemisah.<sup>55</sup>

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### 1) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul.

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

<sup>54</sup>A. Khumedi Ja'far, 2016, *Op. Cit.*, h. 114-116

<sup>55</sup>Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, h. 9

<sup>56</sup>A. Khumedi Ja'far, 2016, *Loc. Cit.*

## 2) Jual beli Munjiz

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

## 3) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri). Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَ فِي لَفْظٍ وَ لَا تَنَاجَشُوا (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar r.a.: Bahwasanya Rasulullah saw melarang jual-beli dengan cara najasy”. Dan dalam lafazh yang lain dinyatakan: Janganlah kamu sekalian melakukan jual-beli dengan cara najasy. (H.R. Bukhari).<sup>57</sup>

## 4) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harga yang lebih murah”. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang). Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

<sup>57</sup>Luthfi Badruzzaman, *Shahih Bukhori Penerjemah Imam Hakim* (Jakarta: Quantum Iklas, 2015) h. 95

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ  
أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ (رواه ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda: *Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu*. (H.R. Muslim).<sup>58</sup>

#### 5) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum merek masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum mengetahui harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Jual seperti ini dipandang kurang baik (dilarang) dikarenakan dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.<sup>59</sup>

#### 6) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi”. Jual beli seperti juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan diantara pedagang (penjual). Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW:

<sup>58</sup> Muslimbinal-Hajjal-Qasyairian-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012, h. 310.

<sup>59</sup> M. Abduh T, “Menjual di atas Jualan Saudaranya”, tersedia di : <https://rumaysho.com/1677-menjual-di-atas-jualan-saudaranya.html>, diakses tanggal 12 November 2018)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَسُومُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ (رواه ومسلم)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda: *Janganlah melakukan saum (penawaran) di atas saum (penawaran) saudaranya. Jangan pula melakukan khitbah di atas khitbah saudaranya*”. (HR. Muslim)<sup>60</sup>

## B. Jual Beli Menurut Hukum Positif

### 1. Pengertian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 kitab undang-undang hukum perdata. Menurut pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>61</sup>

Jual beli menurut pasal 1540 kitab undang-undang hukum perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.<sup>62</sup>

Berdasarkan pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu:

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan harga barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

<sup>60</sup>Muslimbinal-Hajjajal-Qasyairian-Naisaburi, *Op. Cit*, h. 312

<sup>61</sup>R. Subekti, *KUH Perdata dan KUHA Perdata*(Jakarta : Pustaka Buana, 2015), h. 318.

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 330

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>63</sup> Unsur yang terkandung dalam definisi tersebut adalah:

- a. Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan jasa.
- c. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.<sup>64</sup>

Unsur-unsur pokok jual beli berdasarkan pasal 1458 kitab undang-undang hukum perdata adalah setelah orang-orang tersebut sepakat tentang benda dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.<sup>65</sup>

Unsur esensial perjanjian jual beli adalah penyerahan hak milik atas suatu barang dan pembayarannya harus dengan uang. Jika pembayaran dan penyerahan hak milik atas suatu barang tidak dengan uang maka bukanlah perjanjian jual beli tetapi perjanjian barter atau tukar menukar.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 49.

<sup>64</sup>*Ibid.* h.50.

<sup>65</sup>R. Subekti, *Op.cit*, h.318.

<sup>66</sup>Ridwan Khirandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 225.



Berdasarkan rumusan tersebut, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu yaitu penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual melakukan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dalam jual beli terdapat dua sisi hukum perdata yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan.<sup>67</sup>

Pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Kitab undang-undang hukum perdata melihat jual beli hanya dari sisi perikatannya saja yaitu dalam bentuk kewajiban dalam lapangan harta kekayaan dari masing-masing pihak secara timbal balik satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jual beli dimasukkan dalam buku ketiga tentang perikatan.<sup>68</sup>

## 2. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab undang-undang perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian.

Pasal 1320 kitab undang-undang perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

---

<sup>67</sup>Gunawan Widaya dan kartini Mulyadi, *Jual Beli*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 7

<sup>68</sup>*Ibid.* h.8

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Syarat pertama untuk perjanjian adalah suatu kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Kesepakatan merupakan suatu perijinan yang terjadi karena kedua belah pihak sama-sama menyetujui mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak yaitu:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat dimengerti oleh pihak lawan;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami dan diterima oleh pihak lawan.<sup>69</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis. Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan

---

<sup>69</sup>Salim H.S, *Op.cit*, h. 33

akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta, sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Cakap adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata. Dalam pasal 1330 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>70</sup>

Namun berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung melalui surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 5 september 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka

---

<sup>70</sup>R. Subekti, *Op. Cit.*, h.296

berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa., namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Objek perjanjian juga bisa disebut dengan prestasi. Prestasi yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga atau menyerahkan barang;
- 2) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- 3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.<sup>71</sup>

d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata menjelaskan bahwa:

---

<sup>71</sup>Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 69

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya objek;
- 4) Adanya kausa yang halal.<sup>72</sup>

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga dan keempat merupakan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnya secara tidak bebas. Apabila syarat ketiga dan syarat keempat tidak terpenuhi maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah dikemudian hari.<sup>73</sup>

### 3. Subjek dan Objek Jual Beli

#### a. Subjek Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli dengan syarat cakap melakukan perbuatan hukum. Secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli. Sebagaimana dikemukakan berikut ini:

---

<sup>72</sup>*Ibid*, h. 67

<sup>73</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1982), h. 20

1) Jual beli antar suami istri;

Pertimbangan hukum tidak diperkenankan jual beli antar suami istri karena sejak terjadinya perkawinan maka terjadi percampuran harta yang disebut harta bersama kecuali ada perjanjian kawin. Namun ketentuan tersebut ada pengecualiannya antara lain:

- a) Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau suami, dari siapa ia oleh pengadilan telah dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami atau istri menurut hukum.
- b) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah dijual atau uang yang menjadi kepunyaan istri apabila benda tersebut dikecualikan dari persatuan.
- c) Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.

2) Jual beli oleh para hakim, jaksa, advokat, pengacara, juru sita, dan notaris:

Para pejabat tersebut tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli dapat dibatalkan serta dibebankan oleh penggantian biaya, rugi dan bunga.




3) Pegawai yang memangku jabatan umum;

Yang dimaksud disini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang.<sup>74</sup>

b. Objek Jual Beli

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berupa tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:

- 1) Benda atau barang orang lain;
- 2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang;
- 3) Bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan yang baik.



Pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata menggunakan istilah *zaak* untuk menentukan apa yang dapat menjadi objek jual beli. Menurut pasal 499 kitab undang-undang hukum perdata mengemukakan bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan *kebendaan* (*zaak*) adalah barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>75</sup> Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijual dan dibeli tidak hanya barang yang dimiliki melainkan juga suatu hak atas suatu barang yang bukan hak milik.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Salim HS, *Op. Cit.*, h. 50

<sup>75</sup>R. Subekti, *Op. Cit.*, h.147

<sup>76</sup>*Ibid.*,

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Ada beberapa macam jual beli yang dikenal yaitu:

- a. Jual beli dengan percobaan yaitu jual beli yang dilakukan dengan percobaan atau mengenai barang-barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dibuat dengan syarat tangguh.<sup>77</sup> Misalnya jual beli barang-barang elektronik, sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang ingin membeli barang elektronik maka barang tersebut harus dicoba terlebih dahulu. Kemudian barulah si pembeli dapat menentukan jual beli terjadi atau tidak. Percobaan yang dilakukan terhadap barang elektronik ini menunda pelaksanaan jual beli. Jual beli dengan syarat harus dipenuhi agar persetujuan mulai dapat dilaksanakan.
- b. Jual beli dengan contoh tidak disebutkan dalam KUH Perdata. Jual beli jenis ini hanya disinggung sepintas dalam pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu tiap-tiap makelar yang oleh pihak-pihak yang bersangkutan tidak dibebaskan dalam hal ini. Ia pun pasti barang yang dengan perantaraannya dia telah dijual atas contoh, diwajibkan menyimpan barang itu sampai dengan selesainya penyerahan itu dan menandainya dengan catatan-catatan secukupnya supaya dapat dikenal kembali”.<sup>78</sup> Jadi penjual harus menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli sesuai dengan contoh yang diberikan atau diperliatkannya. Didalam pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi, dapat memilih apakah ia, jika

---

<sup>77</sup>Ridwan Khirandy, *Op.cit.* h. 286

<sup>78</sup> Grahamedia Graph, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, cet. I, 2013

hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.<sup>79</sup>

- c. Jual beli dengan hak membeli kembali dapat ditemukan dalam pasal 1519 sampai dengan pasal 1532 KUH Perdata. Dalam jual beli dengan hak membeli kembali, para pihak yaitu penjual dan pembeli dapat memperjanjikan pembeli dengan mengembalikan harga barang dan penggantian biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh pembeli. Jual beli dengan hak mengembalikan kembali ada jangka waktunya yaitu paling lama lima tahun.<sup>80</sup>
- d. Jual beli dengan sistem cicilan ini banyak dipakai sebagai bentuk jual beli, jual beli seperti ini dikenal dengan penjualan kredit dan mengingatkan kita pada jual beli menurut hukum adat, dimana jual beli dianggap telah terjadi seketika antara penjual dan pembeli dan pembayaran harga dianggap harga perbuatan lain yaitu misalnya dianggap sebagai hutang jual beli dengan cicilan juga telah terjadi seketika dan harga jual penjualan akan dibayar dengan sistem bayaran berkala yang dinyatakan secara tegas.
- e. Sewa beli seperti juga jual beli dengan cicilan dan tidak diatur dalam KUH Perdata di Indonesia . dalam sewa atau jual beli sewaa atau horskop, si pembeli tidak langsung menjadi pemilik barang, melainkan hanya sebagai pemakai belaka saja. Milik atas barang yang

---

<sup>79</sup>R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata cet.x* , 2007. h. 286

<sup>80</sup>*Ibid.h.326*

disewabelikan itu baru berpindah kepada si pembeli, apabila seluruh harga telah lunas, pembeli tidak boleh menjual barang. Sewa beli termasuk dalam jenis perjanjian jual beli dan tidak termasuk dalam jenis perjanjian sewa menyewa, meskipun merupakan campuran dari kedua jenis perjanjian tersebut. Oleh karena itu hubungan pembeli dan penjual seperti hubungan sewa menyewa saja, dimana pembeli berhak memakai dan menikmati barang tetapi secara berkala pembeli harus membayar harga barang. Pembayaran ini bukan sebagai imbalan atas pemakaian dan penikmatan barang tetapi sebagai cara untuk memperoleh barang hak milik. Mengenai wan prestasi, jika si pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi harga barang yang disewabelikan itu atau terlambat atau menunggak pembayarannya maka barang diambil oleh pemiliknya (penjual) dan dengan sendirinya sewa beli menjadi batal. Dengan sistem yang seperti ini, terlihat bahwa penjual atau pemilik barang berada dipihak yang kuat atau menguntungkan dan pembeli atau penerima barang berada dipihak yang lemah.

## **5. Hak Konsumen Dalam Jual Beli**

Menurut pasal 1 undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen didasarkan atas asas dan tujuan sebagai berikut:

a. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua belah pihak baik konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan pihak lain. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas Keadilan

Konsumen dan pelaku hendaklah mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban secara adil.

c. Asas Keseimbangan

Perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan suatu produk barang atau jasa.

e. Asas Kepastian Hukum

Pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.<sup>81</sup>

Adapun yang menjadi tujuan dalam perlindungan konsumen sebagai berikut :

---

<sup>81</sup>Ahmad Miru dan Sutaran Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 54

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya akses negatif penggunaan barang dan jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.<sup>82</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak yang dimiliki oleh konsumen sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 55



- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>83</sup>

### **C. Landasan Kehutanan**

#### **1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan**

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerah-kan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis.

---

<sup>83</sup>Kementerian Perdagangan, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 5

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Berdasarkan uraian diatas dikeluarkanlah pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- 2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- 3) Setiap orang dilarang :
  - a) Mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b) merambah kawasan hutan;
  - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
    - (1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    - (2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    - (3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

- (4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - (5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - (6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d) membakar hutan;
  - e) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
  - f) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan;
  - i) mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

- j) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m) mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- 4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>84</sup>

## 2. Peraturan Menteri

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.

---

<sup>84</sup> Kementerian Kehutanan, *Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016)

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.<sup>85</sup>

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan maka dikeluarkan peraturan menteri LHK No. P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>85</sup> *Ibid.*,

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Di samping mempunyai hak memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan uraian diatas hutan kemasyarakatan telah diatur segala sesuatu didalam peraturan menteri LHK No. P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial pada bagian kedua tentang hutan kemasyarakatan pasal 16 sampai dengan pasal 26.<sup>86</sup>

#### Paragraf I

#### Bagian Umum

#### Pasal 16:

- 1) IUPHKm diberikan pada:
  - a) hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
  - b) hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani; dan
  - c) wilayah tertentu dalam KPH.
- 2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.

#### Pasal 17:

- 1) IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS.

---

<sup>86</sup> Peraturan Menteri LHK No. P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/ 2016 Tentang Perhutanan Sosial, Pasal 16 sampai pasal 26

- 2) Pemberian IUPHKm di luar PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.

Pasal 18:

- 1) IUPHKm diberikan oleh Menteri.
- 2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
- 3) Pendelegasian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Paragraf 2

Permohonan Hutan Kemasyarakatan

Pasal 19:

- 1) Permohonan IUPHKm diajukan oleh:
  - a) ketua kelompok masyarakat;
  - b) ketua gabungan kelompok tani hutan; atau c. ketua koperasi.



- 2) Lokasi permohonan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
- 3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS.
- 4) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
- 5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a) Daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
  - b) Gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
  - c) peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk *shape file*.
- 6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 20:

- 1) Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:

- a) gubernur;
  - b) bupati/walikota;
  - c) kepala UPT; dan
  - d) kepala KPH.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

Pasal 21:

- 1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
- 2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- 3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- 4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
- 5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.

- 6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.

Pasal 22 :

- 1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
  - a) Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan;
  - b) UPT terkait;
  - c) KPH; dan
  - d) anggota Pokja PPS.
- 2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya.
- 3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
- 4) Pedoman verifikasi permohonan IUPHKm diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 23 :

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan IUPHKm kepada Gubernur

Pasal 24 :

- 1) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS.
- 2) Permohonan IUPHKm kepada gubernur diajukan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:
  - a) Menteri;
  - b) bupati/walikota;
  - c) kepala UPT; dan
  - d) kepala KPH.
- 3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (*online/daring*).

Pasal 25 :

- 1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

- 2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- 3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- 4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur.
- 5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- 6) Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.

Pasal 26 :

- 1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHKm paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
- 2) Gubernur menerbitkan IUPHKm, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.

- 3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan pemberian IUPHKm, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur.
- 4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- 6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.
- 7) Dalam hal pemberian IUPHKm berada di dalam Hutan Produksi, keputusan pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sekaligus merupakan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

### BAB III

#### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan

##### 1. Letak Geografis Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan

Secara geografis, kawasan Hutan Lindung Batu Serampok berada pada posisi  $105^{\circ} 19' 55''$  BT -  $105^{\circ} 27' 33''$  BT dan  $5^{\circ} 26' 48''$  LS -  $5^{\circ} 32' 14''$  LS, seperti terlihat pada Gambar 2.1, dan secara pengelolaan merupakan wilayah kerja UPTD Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Selatan Rayon III. Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok secara administratif berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Register 17 mempunyai luas wilayah 7.230 Ha.<sup>1</sup>

Letak wilayah Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Register 17 secara administratif berbatasan dengan :

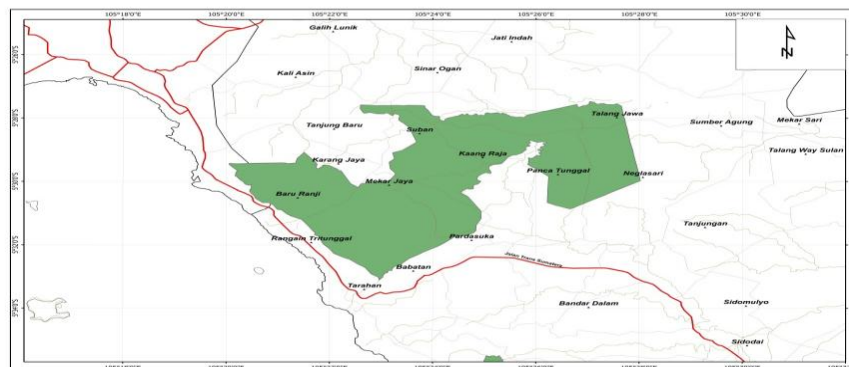
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Katibung dan Teluk Lampung
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Merbau Mataram.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Katibung.

---

<sup>1</sup>Data KPH Gn. Rajabasa-Way pisang-Batu Serampok yang diperoleh dari wawancara dengan koordinator lapangan Bpk. Reki Candra, S.P, M.Si



Gambar. 1

*Peta Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok*

**Sumber:** Data KPH Gn. Rajabasa-Way pisang-Batu Serampok Tahun 2016

Penutupan lahan berupa lahan perkebunan dan tanah garapan terbuka mudah dijumpai dan banyak yang sedang aktif digarap oleh masyarakat mulai dari batas kawasan hutan pada ketinggian 50 mdpl hingga berbatasan dengan hutan alam dengan ketinggian 500 m dpl atau lebih. Semak belukar merupakan bekas lahan garapan yang ditinggalkan oleh para penggarap dalam waktu yang relatif lama sehingga ditumbuhi oleh tumbuhan bawah seperti rumput, perdu, dan alang-alang.

Kondisi lahan seperti ini tersebar di dalam kawasan pada berbagai kelas kelerengan mulai bergelombang hingga sangat curam seperti yang terdapat di kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Register 17. Masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk budidaya tanaman perkebunan yang bersifat musiman dengan pola kebun campuran yang tersebar luas, merupakan kombinasi tanaman perkebunan cengkeh, kemiri, pala, kemiri, aren, durian dan lain-lain.

2. Sejarah terbentuknya Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan

Pada tahun 2012, beberapa penggarap memiliki inisiatif untuk membuat kelompok tani. Setelah melakukan perbincangan, beberapa penggarap melakukan pergerakan untuk berkoordinasi dengan kordinator lapangan KPH Gn. Rajabasa-Way Pisang-Batu Serampok bagian Register 17 Batu Serampok yaitu bapak Reki Candra, S.P, M.Si membahas mengenai pembentukan kelompok tani Register 17 Batu Serampok.

Koordinasi yang dilakukan untuk membentuk kelompok tani ternyata telah diatur pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut.II/2007 tentang hutan kemasyarakatan sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri LHK nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2016 menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang diprogramkan untuk pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Setelah melakukan koordinasi, beberapa penggarap tersebut melakukan perkumpulan dengan seluruh masyarakat yang memiliki lahan di kawasan hutan lindung register 17 batu serampok. Ucu Syamsudin sebagai koordinator mengadakan perkumpulan tersebut menyampaikan bahwa Kelompok Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu lembaga tingkat petani yang mempunyai nilai tambah dalam melestarikan hutan, yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya wadah kelompok, akan lebih mudah baik pemerintah melakukan

sosialisasi dan pembinaan didalam setiap program pemerintahan yang direncanakan.<sup>2</sup>

Perkumpulan atau musyawarah yang dilakukan juga untuk membentuk struktur kepengurusan baik ketua, sekretaris dan bendahara. Pembentukan ini dilakukan agar mempermudah mengkoordinir masyarakat penggarap. Ketua yang terpilih saat itu adalah Ucu Syamsudin, Sekretaris adalah Firmansyah, dan Bendahara adalah A. Haetami.

Dalam rangka menjalankan organisasi dan untuk memperkuat kelompok dalam pengelolaan hutan dibuatlah aturan main kelompok. Aturan main kelompok terdiri dari atas nama kelompok, tujuan kelompok, hak dan kewajiban kelompok, larangan serta sanksi kelompok. Segala permasalahan kelompok akan diselesaikan didalam kelompok.

Musyawarah yang dihadiri koordinator lapangan KPH Gn. Rajabasa-Way Pisang-Batu Serampok untuk menyampaikan mekanisme pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm). Syarat pengajuan dengan mendaftarkan diri kepada pemerintah dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk (KTP) dan melaporkan lahan yang digunakan dan jenis tanaman serta harus dilakukan pengukuran lahan oleh lembaga dengan biaya yang disepakati. Biaya yang sepakati sebesar 350 ribu rupiah.

Dengan syarat pengajuan tersebut masyarakat penggarap banyak yang tidak sepakat dan tidak ingin dilakukan pengukuran serta tidak mau mengikuti peraturan pemerintah dikarenakan mereka telah menduduki lahan

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Ucu Syamsudin, Ketua Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6 Desember 2018

tersebut sejak puluhan tahun lalu. Jadi anggapan masyarakat walaupun tanpa mereka memperoleh izin dari pemerintah, mereka tetap dapat menggunakan perkebunan di kawasan hutan lindung tersebut. Dan sampai saat ini, HKm Register 17 Batu Serampok tidak memperoleh izin dan juga telah terjadi penggantian kepengurusan kelompok yaitu sekretaris dan bendahara.

3. Visi Misi Terbentuknya Kelompok Tani Hutan kemasyarakatan Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan

Visi : Membangun kawasan hutan lindung register 17 batu serampok menuju masyarakat mandiri.

Misi :

- a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didalam dan sekitar kawasan hutan lindung register 17 batu serampok.
- b. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan , secara maksimal dengan tetap memperhatikan fungsi hutan disegi sosial, ekonomi, dan ekologi.
- c. Pengembangan usaha usaha ekonomi produktif, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada.
- d. Pemberantasan illegal logging.
- e. Wadah permohonan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm)<sup>3</sup>

4. Struktur Kelompok Hutan Kemasyarakatan Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan

---

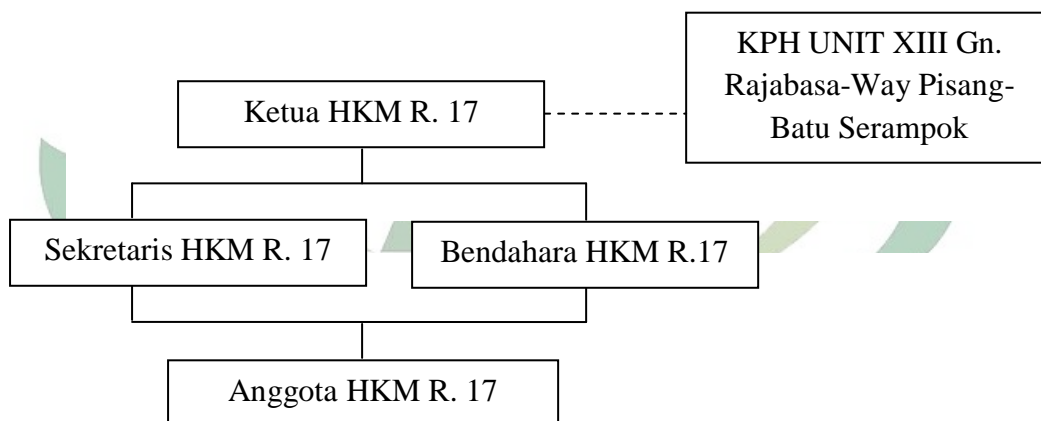
<sup>3</sup>Wawancara dengan Supriyanto, Sekretaris Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6 Desember 2018

Sebagai suatu kelompok atau organisasi yang bergerak dalam bidang perkebunan atau pertanian untuk melakukan usaha yang bertujuan untuk mencari laba keuntungan maka sangat dibutuhkan manajemen kelompok atau organisasi yang baik. Kelompok atau organisasi merupakan wadah dimana sekelompok orang yang dapat bergabung satu sama lain untuk mencapai tujuan tersebut.

Adapun struktur kelompok hutan kemasyarakatan sebagai berikut:

Gambar. 2

Struktur Kelompok HKM Register 17 Batu Serampok



**Sumber:** *Data Kelompok Tani register 17 Batu Serampok Tahun 2016*

Pada setiap bagian struktur memiliki tugas dan tanggung jawab kerja masing-masing antara lain sebagai berikut:

- a. KPH Unit XIII (Gn. Rajabasa-Way Pisang-Batu Serampok) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan di register 17 batu serampok meliputi:
  - 1) Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan hutan register 17 batu serampok

- 2) Pemanfaatan hutan register 17 batu serampok
  - 3) Penggunaan kawasan hutan register 17 batu serampok
  - 4) Rehabilitasi dan reklamasi hutan register 17 batu serampok
  - 5) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, dan kabupaten untuk diimplementasikan
  - 6) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan register 17 batu serampok mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
  - 7) Melaksanakan pemantauan dan penilaian kegiatan pengelolaan hutan yang dikelola oleh kelompok tani hutan yang sudah mendapatkan izin HKM.<sup>4</sup>
- b. Ketua HKM Register 17 Batu Serampok adalah Ucu Syamsudin, yang bertugas untuk mengorganisir seluruh anggota kelompok.
- c. Sekretaris HKM Register 17 Batu Serampok adalah Supriyanto, yang bertugas mencatat dan menyiapkan administrasi kegiatan kelompok.
- d. Bendahara HKM Register 17 Batu Serampok adalah Wiwik Mashuri, yang bertugas mencatat dan melaporkan keuangan kelompok.
- e. Anggota HKM Register 17 Batu Serampok adalah seluruh masyarakat tergabung dan mempunyai lahan perkebunan di hutan lindung.<sup>5</sup>
5. Daftar Masyarakat Yang Memiliki Lahan Perkebunan di Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan ( Tabel. 1 Terlampir).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Data KPH Gn. Rajabasa-Way pisang-Batu Serampok yang diperoleh dari wawancara dengan koordinator lapangan Bpk. Reki Candra, S.P, M.Si

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ucu Syamsudin, Ketua Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6 Desember 2018

## B. Praktik Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan

Hasil penelitian yang terkait dengan penjualan hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok adalah dengan cara mengumpulkan hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung setiap harinya. Masyarakat berkebun biasanya pada pagi hari sampai sore hari untuk mengambil hasil perkebunan seperti kemiri, cengkeh, tangkil, jengkol, petai, pisang, cabai dan kelapa.<sup>7</sup> Hasil perkebunan yang diperoleh pada hari itu juga langsung dibawa oleh penggarap ke pengepul atau pembeli. berikut data hasil perkebunan per hari<sup>8</sup> yaitu :

**Tabel. 2**

Data hasil perkebunan per hari

No.	Tanaman	Hasil
1	Kemiri	10-20 Kg
2	Tangkil	10-15 Kg
3	Cengkeh	10-15 Kg
4	Jengkol	10-20 Kg
5	Cabai	5-10 Kg
6	Kelapa	15-25 biji
7	Petai	50-100 biji
8	Pisang	10-15 Rumpun

**Sumber:** Data wawancara pada tanggal 6 Desember 2018

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Supriyanto, Sekretaris Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6 Desember 2018

<sup>7</sup>Wawancara dengan M. Yamin, Anggota Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6 Desember 2018

<sup>8</sup>Wawancara dengan beberapa penggarap atau penjual, AnggotaKelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6 Desember 2018



Berdasarkan hasil observasi, Apabila musim durian maka penggarap atau penjual berkebun pada sore hari. mereka menginap untuk menunggu buah durian yang jatuh apabila penggarap tidak menunggu lahan perkebunan mereka sendiri maka buah durian yang jatuh atau hasil perkebunan tersebut diambil oleh penggarap yang lain. Hasil perkebunan (buah durian) dikumpulkan digubuk dan dimasukan kedalam karung 50 Kg biasanya masyarakat penggarap setiap harinya memperoleh 10 sampai dengan 20 buah durian.<sup>9</sup>

Pada esok hari sekitaran pukul 10.00-11.00 WIB, Masyarakat penggarap membawa hasil perkebunan (buah durian) ke pengepul atau pembeli. Setelah transaksi jual beli dilaksanakan masyarakat penggarap pulang kerumah dengan membawa hasil penjualan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>10</sup> Berikut data harga yang penulis peroleh dari pengepul atau pembeli hasil perkebunan antara lain<sup>11</sup>:

**Tabel. 3**  
Data harga dari pembeli

No.	Tanaman	Satuan	Harga
1	Kemiri	1 Kg	5.000
2	Tangkil	1 Kg	7.000
3	Cengkeh	1 Kg	7.000
4	Jengkol	1 Kg	15.000
5	Cabai	1 Kg	20.000
6	Kelapa	1 Gandeng = 2 biji	2.500

<sup>9</sup>Wawancara dengan A. Suryani, Anggota Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6 Desember 2018

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ujang Rasyid, Anggota Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 6Desember 2018

<sup>11</sup>Wawancara dengan Rudi, Pembeli hasil perkebunan dari Kelompok Tani Register 17 Batu Serampok, Lampung Selatan, 20Desember 2018

7	Petai	1 Ikat = 100 biji	75.000
8	Pisang	1 kg	1.500
9	Durian	1 Biji	10.000

**Sumber:** *Data wawancara dengan pembeli pada tanggal 20 Desember 2018*

Setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, kemudian penjual menjelaskan secara jujur bahwasannya hasil perkebunan tersebut adalah barang yang berasal dari kawasan hutan lindung dan konsumen atau pembeli tersebut juga sama-sama mengetahui barang tersebut adalah barang yang berasal dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok.

Oleh karena itu, pembeli melakukan akad kesepakatan bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atas pembelian barang tersebut maka pembeli tidak ikut atau tidak terlibat atau tidak bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut dikarenakan pihak pembeli tidak ingin mengambil resiko bahwasannya barang yang dibeli merupakan hasil perkebunan di kawasan hutan lindung yang belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm).

Hasil perkebunan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli akan menjualkan kembali hasil perkebunan tersebut ke Jakarta dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu hingga mencapai 100 Kg atau lebih.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Terhadap Praktik Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Register 17**

Setelah penulis mengumpulkan data dari data yang didapat dari perpustakaan maupun dari lapangan yang kemudian dituangkan dalam penyusunan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan. Akad Jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok merupakan jual beli yang dilakukan secara langsung di rumah pembeli dan dilakukan oleh orang-orang (penjual dan Pembeli) yang sudah dewasa. Transaksi jual beli ini diawali oleh penjual yang mendatangi kerumah pembeli untuk melakukan penjualan hasil perkebunan yang diperoleh dari kawasan hutan lindung.

Praktik jual beli hasil perkebunan di kawasan hutan lindung pada umumnya berdasarkan prinsip syariah yakni pihak penjual menyerahkan barang secara langsung kepada pihak pembeli yang telah disepakati bersama. Sebelum pihak penjual dan pembeli mulai melakukan transaksi jual beli terlebih dahulu harus membuat suatu akad. Dalam akad ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pihak penjual dan pembeli. Setelah akad dalam jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak maka akan menimbulkan hubungan yang saling melengkapi antara kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Dalam praktik jual beli tersebut terdapat hal-hal yang harus dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menjalankan aturan-aturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Berkaitan dengan jual beli hasil perkebunan di kawasan hutan lindung, penjual telah menjelaskan secara jujur bahwasannya hasil perkebunan tersebut adalah barang yang berasal dari kawasan hutan lindung dan konsumen atau pembeli tersebut juga sama-sama mengetahui barang tersebut adalah barang yang berasal dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok. Oleh karena itu, pembeli melakukan kesepakatan bahwa apabila dikemudian hari terjadi permasalahan atas pembelian barang tersebut maka pembeli tidak terlibat atau tidak bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut dikarenakan pihak pembeli tidak ingin mengambil resiko bahwasannya barang yang dibeli merupakan hasil perkebunan di kawasan hutan lindung yang belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm). Hal inilah yang menjadi permasalahan dikarenakan hasil perkebunan di kawasan hutan lindung tanpa izin dari pemerintahan atau dapat dikatakan ilegal.

Padahal pihak penjual atau masyarakat penggarap lahan hutan lindung tersebut mengetahui jika menggunakan lahan tersebut melanggar undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan menteri LHKNo.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial tetapi hal ini tidak dipikirkan oleh penggarap atau penjual. Menurut mereka, hal ini merupakan hal yang biasa dan tidak akan ada dampak apapun dan bukan

merupakan pelanggaran dikarenakan mereka telah menduduki lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Begitu pula, pihak pembeli mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum sehingga kesalahan tersebut dianggap tidak berarti apa-apa bagi masyarakat.

Hal ini secara umum dapat diterima dengan baik oleh pembeli maupun penjual. Namun yang menjadi permasalahan objek jual beli adalah hasil perkebunan yang ilegal atau dilarang undang-undang. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pada pasal 50 ayat 2 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Secara rinci dipaparkan atau dijelaskan mengenai pasal tersebut pada peraturan menteri LHKNo.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial pada bagian kedua tentang hutan kemasyarakatan pasal 16 sampai dengan pasal 26.

Berdasarkan yang dipaparkan, saya melakukan penelitian apakah masyarakat mengetahui dan memahami tentang undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan menteri LHKNo.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial.

Tabel. 4

Pengetahuan Masyarakat Tentang UU No. 41 Th. 1999 dan Permen LHK  
No. P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016

No.	Nama	UU No. 41 Th. 1999 dan Permen LHK No. P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016	
		Memahami	Tidak Memahami
1	Ucu Syamsudin	✓	

2	Supriyanto	✓	
3	Wiwi Matsuri	✓	
4	M. Yamin		✓
5	Jamin		✓
6	Roni		✓
7	Ujang Rasyid		✓
8	Nanang		✓
9	Aruman		✓
10	Ahmad Suryani		✓
11	Sumarna		✓
12	Haetami		✓
13	Rohimi		✓
14	Nasuha		✓
15	Rohmad		✓
16	Sarkah		✓
17	Badrudin		✓

**Sumber:** Data wawancara 20 Desember 2018

Berdasarkan data diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat penggarap banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang peraturan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan peraturan menteri LHKNo.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial.


Dalam jual beli ini yang dijadikan objeknya adalah hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung yang bersifat ilegal dikarenakan melanggar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bisnis jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung perlu perhatian serius yang seharusnya masyarakat mengikuti aturan yang berlaku untuk menggunakan lahan hutan lindung dengan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm).

## **B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung Register 17**

### **1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung**

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama dikerjakan orang-orang atau masyarakat. Transaksi jual beli yang dilakukan telah diatur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan larangan pada setiap transaksi jual beli. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini mengenai bahwa jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung terdapat beberapa sistem yang berlaku yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Dari segi subjeknya (Kedua orang yang berakad)**




Subjek dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat yaitu Baligh, Berakal, Dengan kehendak sendiri, dan Tidak mubadzir. Dalam jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung, orang yang melakukan akad tersebut sudah baligh, dewasa dan berakal. Hal ini disimpulkan karena orang yang melakukan transaksi jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung bukanlah orang yang bodoh, anak kecil dan orang pemabuk yang dianggap tidak sah. Pihak penjual dan pihak pembeli dinilai tidak ada paksaan untuk membeli atau menjual sesuatu karena hal ini berdasarkan saling ridho atau suka sama suka. Dalam segi subjek yang berakad pada jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.



b. Dari Segi Objeknya (Barang yang diperjualbelikan)


Objek dalam jual beli adalah barang yang yang dijadikan untuk transaksi jual beli. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah suci atau bersih barangnya, harus dapat dimanfaatkan, barang itu hendaklah dimiliki sepenuhnya oleh orang yang berakad, berkuasa menyerahkan barang itu dan barang itu dapat diketahui. Dalam jual beli hasil perkebunan yang dijadikan objek adalah hasil perkebunan yang diperoleh penjual atau penggarap dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok lampung selatan.



Hasil perkebunan merupakan barang yang suci atau bersih dikarenakan bukan arak, bangkai, babi, anjing atau berhala yang dihukum najis oleh Al-Qur'an. Syarat barang hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad dan berkuasa menyerahkan barang itu terpenuhi, namun pada praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung, kepemilikan hasil perkebunan oleh penjual atau penggarap masih diragukan dikarenakan hasil perkebunan tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung yang belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm). Hal ini berarti tidak ada akad serah terima kepemilikan atau pemanfaatan lahan antara pemerintah dengan penggarap lahan kawasan hutan lindung sehingga menurut peneliti, penggarap lahan kawasan hutan lindung tidak berkuasa untuk mengambil hasil perkebunan bahkan menyerahkan atau menjualkan hasil perkebunan ke pihak lain dalam hal ini pembeli atau pengepul.

Dari beberapa syarat objek barang yang diakadkan diatas, dalam pelaksanaannya beberapa syarat sudah terpenuhi dan ada beberapa syarat yang belum atau tidak terpenuhi. Diantaranya, barang itu secara sah tidak dimiliki oleh penggarap atau penjual dan penggarap atau penjual tidak berkuasa untuk mengambil dan menyerahkan atau menjualkan barang tersebut ke pihak lain.

c. Dari segi sighatnya (Lafadz akad ijab kabul)



Pelaksanaan jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung apabila dilihat dari sighatnya (Lafadz ijab kabul) telah memenuhi syarat yaitu tidak ada yang membatasi (memisahkan), tidak diselingi kata-kata lain, tidak dibatasi waktu dan ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang berupa barang yang dijual dan harga barang. Dimana harga barang tersebut telah ditentukan oleh pembeli yaitu seperti yang dipaparkan diatas pada BAB. III halaman 62. Harga tersebut juga telah disepakati oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan sudah tidak dibatasi, barang tersebut dihadirkan ditempat dapat dilihat, dengan mengetahui secara rinci jenis, berat dan banyaknya sehingga ketika melakukan lafadz ijab kabul barang dapat langsung diserahkan.

Jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadist yang menyebutkan hukum dari penjualan hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung. Hukum dalam setiap kegiatan muamalah adalah boleh selama belum ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا  
وَحَلَالًا قُلْ ۚ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". (Q.S. Yunus (10): 59)

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi, salah satunya yaitu barang dapat diketahui. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan akad. Jual beli seperti ini disebut jual beli fudhul.

Persoalan yang muncul dari penelitian tentang jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung terdapat rukun dan syarat jual beli yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh oleh penjual. Permasalahan ini masih menjadi perdebatan antar ulama mengenai jual beli fudhul seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

- a. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Dalam akad jual beli fudhuly ini adalah bersifat

mauquf (bergantung) kepada kerelaan pihak yang berwenang (pemilik atau walinya). Jual beli fudhuly bersifat mauquf hukumnya sah. Dengan kata lain jika penggarap mendapatkan IUPHkm dari pemerintah sebelum menjual hasil perkebunan maka jual beli tersebut bersifat sah.

- b. Menurut jumhur ulama Syafi'iyah, Al-Dzhoriyah dan Hanabillah, jual beli fudhul adalah hukumnya tidak sah, walaupun memperoleh izin dari pemiliknya (pemerintah) dikarenakan barang yang diperjualbelikan disini dilihat dari aspek kepemilikan. Didalam jual beli ini penjual hanyalah penggarap lahan kehutanan dan kepemilikan hutan adalah pemerintah.



Berdasarkan pendapat ulama diatas dan hal-hal yang dipaparkan sebelumnya peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok Lampung selatan dinyatakan tidak sah dikarenakan penjual selaku penggarap lahan hutan lindung sebagai perkebunan tidak mendapatkan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm) dari pemerintah sehingga objeknya tidak memenuhi syarat dalam jual beli dan penjual tidak menaati ulil amri (pemerintah).

## 2. Pandangan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Hasil Perkebunan Dari Kawasan Hutan Lindung

Syarat sahnyanya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab undang-undang perdata menyatakan bahwa untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Syarat pertama untuk perjanjian adalah suatu kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. seperti yang dilakukan oleh penjual dan pembeli didalam jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung, mereka melakukan perjanjian/kesepakatan secara sukarela atas dasar keridhaan dan suka sama suka. Berdasarkan hal tersebut syarat pertama dalam jual beli sudah terpenuhi.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

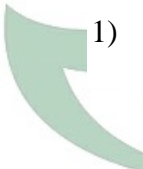
Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli dengan syarat cakap melakukan perbuatan hukum. Syarat orang cakap dalam hukum adalah dewasa dan berakal maka syarat ini sudah terpenuhi. Dalam transaksi jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung bahwa subjeknya yaitu pihak penjual dan pembeli sudah sama-sama dewasa dan mereka dapat membedakan yang baik dan buruk

serta mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (berakal) sehingga dalam hukum sudah memenuhi syarat subjek dalam transaksi jual beli.

c. Suatu hal tertentu (Objek perjanjian);

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa., namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berupa tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Dalam hal penelitian ini yang menjadi objek perjanjian adalah barang atau hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung. Sedangkan objek yang tidak diperkenankan/dilarang untuk diperjualbelikan adalah:

1) Benda atau barang orang lain;




Dalam praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung, status kepemilikan hasil perkebunan oleh penjual atau penggarap masih diragukan. Hasil perkebunan tersebut diperoleh dari kawasan hutan lindung yang belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm) sehingga lahan tersebut masih milik orang lain. Dalam hal ini orang yang dimaksud adalah pemerintah.

2) Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang;

Dalam praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung, yang menjadi objek atau barang adalah hasil perkebunan. Hasil perkebunan ini diperoleh dari kawasan hutan lindung yang

belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm) sehingga melanggar Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 dan Peraturan Menteri LHKNo.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial pada bagian kedua tentang hutan kemasyarakatan pasal 16 sampai dengan pasal 26.

3) Bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan yang baik.



Ketertiban adalah merupakan sebuah perilaku yang mengikuti aturan berlaku. Peranan ketertiban adalah untuk menjadikan masyarakat taat terhadap aturan yang berlaku sehingga timbulnya keserasian. Kesusilaan adalah perilaku yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung apabila secara jelas telah melanggar undang-undang dan peraturan menteri maka secara tidak langsung telah bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan. Berdasarkan yang dipaparkan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa objek perjanjian yaitu hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung tidak memenuhi syarat yang ketiga.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dipaparkan mengenai objek perjanjian bahwa praktik jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka syarat yang ke-empat ini juga tidak terpenuhi..

Dari empat syarat jual beli diatas, dalam pelaksanaannya Syarat pertama dan kedua sudah terpenuhi tetapi syarat ketiga dan keempat belum atau tidak terpenuhi yaitu barang atau objek perjanjian secara sah tidak dimiliki oleh penggarap atau penjual dan penggarap atau penjual tidak berkuasa untuk mengambil dan menyerahkan atau menjualkan barang tersebut ke pihak lain dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat yang ketiga dan keempat merupakan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnya secara tidak bebas. Apabila syarat ketiga dan syarat keempat tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali.



Berdasarkan peraturan hukum yang dipaparkan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok Lampung selatan dinyatakan tidak diperbolehkan dikarenakan penjual selaku penggarap lahan perkebunan dikawasan hutan lindung telah melanggar peraturan perundangan-undangan, Peraturan Menteri LHK sebagai pengelola secara penuh hutan negara, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung tidak memenuhi syarat dalam jual beli.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan dan menganalisis data serta sebagaimana yang telah dikemukakan pada halaman-halaman terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan yaitu:

1. Bahwa praktik akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung adalah barang yang berasal dari kawasan hutan lindung dan register 17 Batu Serampok yang belum memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHkm).
2. Bahwa Akad jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung register 17 batu serampok Lampung Selatan Menurut Hukum Islam dilarang dikarenakan masuk kedalam kategori jual beli fudhul dimana objeknya tidak memenuhi syarat dalam jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus dimiliki secara penuh dan orang yang berkuasa untuk menyerahkan barang serta penjual tidak menaati ulil amri dan Menurut Hukum Positif tidak diperbolehkan dikarenakan penjual selaku penggarap lahan hutan lindung sebagai perkebunan telah melanggar peraturan perundangan-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum sehingga jual beli hasil perkebunan dari kawasan hutan lindung tidak memenuhi syarat dalam jual beli atau jual beli ini dilarang.

## **B. Saran**

Ada beberapa hal yang patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini antara lain:

1. Penjual atau penggarap lahan hutan lindung harus menyadari bahwa telah menggunakan lahan hutan lindung tanpa mendapatkan izin usaha pemanfaatan lahan hutan kemasyarakatan (IUPHkm). Oleh karena itu, kepemilikan lahan hutan lindung tersebut adalah hak pemerintah dan tidak diperbolehkan bagi penjual dan penggarap memanfaatkan dan mengambil barang atau hasil perkebunan milik orang lain (pemerintah).
2. Penjual atau penggarap lahan hutan lindung diharapkan untuk menggali dan menambah wawasan atau ilmu tentang ekonomi Islam, peraturan perundang-undangan serta dapat memahami dan mengaplikasikan ekonomi Islam dan peraturan perundang-undangan dalam bermuamalah (jual beli).
3. Pemerintah diharapkan untuk lebih aktif untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku baik undang-undang ataupun peraturan menteri agar masyarakat dapat lebih mengerti peraturan tentang hutan lindung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah, et.al. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Al Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Penerjemah Achmad Sunarto, Jakarta: Pustaka Alami, 1995, Cet.Pertama.
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori. *Shahih Bukhori*. No. Hadist 2011.
- , *Shahih Bukhori*. No. Hadist 2083.
- Al-Jazairy, Abdurrahman. *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib Al-Arba'ah, Juz II*. Beirut: Darul kutub Al-Ilmiah, 1990.
- Al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz.3. Maktabah Kutub Al-Mutun (Al-Mutun)5/5
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana ilmu, 2001, Jilid I.
- Aris Munandar. <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html>., diakses Tanggal 1 November 2018.
- As-shiddiqy, Tengku Muhammad. *Koleksi Hadis-Hadis*. Bandung, Airlangga, 2015.
- Azzam, Abdul Aziz M. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam, Penerjemah: Nadirsyah Hawari*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Data-Data KPH (Kesatuan Pengelola Hutan) Gn. Rajabasa-Way Pisang-Batu Serampok.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008, Cet.VIII.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Al adalah*, Vol. 12 No 2 2015. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2015). (online). tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214>. (1 November 2018). dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Hadi, Sutrisno. *Metode Research Fakultas Teknologi UGM*. Yogyakarta: UGM Press, 1986.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

<https://kbbi.web>. Diakses tanggal 3 Mei 2018

Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadis 3494, Juz. 8.

Imam Malik, Muwatha, No. Hadist 1168, Juz 4.

Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Shaleh), Penerjemah K.H Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Mustafa. Surabaya: Bina Iman, 1995.

Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2015.

-----, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permata Net Publishing, 2016.

K. Lubis, Surawardi, et.al. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan Online, KBBI Pusat Bahasa.

Kementerian Perdagangan. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Khirandy, Ridwan. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Luthfi Badruzzaman, *Shahih Bukhori Penerjemah Imam Hakim* Jakarta: Quantum Iklas, 2015

M. Abduh T, "Menjual di atas Jualan Saudaranya", tersedia di : <https://rumaysho.com/1677-menjual-di-atas-jualan-saudaranya.html>. diakses tanggal 12 November 2018.

Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*. Semarang: IAIN Walisongo, 2002.

Muhammad Asy-Syarbini, Mugni Al-Muuhtoj, Juz II

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982.

Muhammad Maksum. "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah". *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. 12 No. 1 2014. (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung 2014), (online), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/174/414>. (29 Maret 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mulyadi, Kartini, et.al. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, Jakarta: Almahira, 2012.

Muslich Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Penerbit Amzah : Jakarta, 2015.

Pati, Sakka, et.al. *Hukum perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Peraturan Menteri Kehutanan Tentang Hutan Kemasyarakatan No.P.88/Menhut-II/2014.

Peraturan Menteri LHK No. P.83/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Prabunda, Muhammad T. *Metodologi Riset*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemahan Fiqh Sunnah*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1987, Jilid 3.

Saebani, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.

Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015.

Subekti. *KUH Perdata dan KUHA Perdata*. Jakarta : Pustaka Buana, 2015.

Subendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan RAD*. Bandung : Alfabeta, 2008., cet. IV.

-----, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2009)  
 Sutrisno. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kuaitatif Kuantitatif dan R&D*.  
 Bandung: Fakultas Teknologi UGM, 2009.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Tjitrosudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

W.J.S Poedarminta. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1997.

Yodo, Sutaran, et.al. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.



**Tabel. 1**

Daftar masyarakat yang memiliki lahan perkebunan dikawasan hutan lindung  
register 17 Batu Serampok

NO	NAMA	ALAMAT	Tanaman
1	RIZAL UIN	HUTAN TUA	Kemiri, Cengkeh dan Jengkol
2	ROHMAT	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
3	SANURI	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
4	ROHELI	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
5	ROHINI	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
6	SARUDIN	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Jengkol, Kelapa, Tangkil, dan Mangga
7	NURDIN	HUTAN TUA	Kelapa, Durian, Cengkeh, Pala, jengkol, Petai dan Kakau
8	NARIM	HUTAN TUA	Durian, Tangkil, Jengkol dan cengkeh
9	ATMAJA	HUTAN TUA	Durian, Jengkol, Kemiri, Tangkil, Petai dan Cengkeh
10	SAMIRIN	HUTAN TUA	Durian, Jengkol, Cengkeh, Tangkil dan Kemiri
11	JONI	HUTAN TUA	Cengkeh, Jengkol, Pala, Durian dan Kakau
12	RASAM	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Kemiri, Tangkil dan Jengkol



13	SUTIO	HUTAN TUA	Tangkil, Durian, Cengkeh, Kemiri, dan Kopi
14	JASMAN	HUTAN TUA	Jengkol, Durian, Petai, Tangkil dan Cengkeh
15	HAERUDIN	HUTAN TUA	Durian, Duku, Jengkol, Tangkil dan Cengkeh
16	OBI S	HUTAN TUA	Durian, Kemiri, Petai, dan Duku
17	UA	HUTAN TUA	Durian, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
18	SUPENDI	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Kemiri, dan Tangkil
19	ROHEDI	HUTAN TUA	Cengkeh, Durian, Jengkol, Petai, Kelapa dan Duku
20	MARYANI	HUTAN TUA	Cengkeh, Durian dan Jengkol
21	SITI R	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Kemiri, dan Tangkil
22	ACEP	HUTAN TUA	Jengkol, Cengkeh, Kakau, Pisang, Petai, Duku, dan Tangkil
23	SUGRIWA	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, dan Tangkil
24	SAMINAH	HUTAN TUA	Durian, Tangkil, Jengkol, Duku dan Kakau
25	BANWANI	HUTAN TUA	Durian, Kemiri, Petai, dan Duku
26	BUDI	HUTAN TUA	Durian, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
27	IJA H	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Kemiri, dan Tangkil
28	SUHAMIN	HUTAN TUA	Cengkeh, Durian, Jengkol, Petai, Kelapa dan Duku
29	BARBINI	HUTAN TUA	Cengkeh, Durian dan Jengkol

30	SIDIK	HUTAN TUA	Cengkeh, Durian, Jengkol, Petai, Kelapa dan Duku
31	ROHMAN	HUTAN TUA	Cengkeh, Durian, Jengkol, Petai dan Kakau
32	A. ROFIUDIN	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Kemiri, Tangkil dan Jengkol
33	AHMAD YANI	HUTAN TUA	Tangkil, Durian, Cengkeh, Kemiri, dan Kopi
34	SARMADA	HUTAN TUA	Jengkol, Durian, Petai, Tangkil dan Cengkeh
35	SYAMSUDIN	HUTAN TUA	Durian, Duku, Jengkol, Tangkil dan Cengkeh
36	MUNAH	HUTAN TUA	Jengkol, Durian, Petai, Tangkil dan Cengkeh
37	SURHI	HUTAN TUA	Durian, Duku, Jengkol, Tangkil dan Cengkeh
38	JAKIM	HUTAN TUA	Duku, Kemiri, Durian, Petai, Jengkol dan Cengkeh
39	MUHADA	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Lada, Pisang, Jengkol dan Durian
40	INDRA LESMANA	HUTAN TUA	Duku, Kemiri, Durian, Petai, Jengkol dan Cengkeh
41	RASUDIN	HUTAN TUA	Jengkol, Durian, Petai, Tangkil dan Cengkeh
42	NARHAWI	HUTAN TUA	Durian, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
43	M. HUSAINI	PILAR	Duku, Kemiri, Durian, Petai, Jengkol dan Cengkeh
44	SUHANI	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Lada, Pisang, Jengkol dan Durian

45	HASANUDIN	HUTAN TUA	Duku, Kemiri, Durian, Petai, Jengkol dan Cengkeh
46	LOMRI	HUTAN TUA	Jengkol, Durian, Petai, Tangkil dan Cengkeh
47	DARSAN	HUTAN TUA	Durian, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
48	SUDIRMAN	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Lada, Pisang, Jengkol dan Durian
49	SIRAD	HUTAN TUA	Duku, Kemiri, Durian, Petai, l dan Cengkeh
50	M. YAMIN	HUTAN TUA	Durian, Cengkeh, Tangkil, Jengkol dan Mangga
51	SARNAH	HUTAN TUA	Kemiri, Durian, Jengkol, Tangkil dan Kelapa
52	JAMIN	HUTAN TUA	Tangkil, Durian, Kemiri, Petai, Jengkol, Pisang
53	A.TUNISI	HUTAN TUA	Durian, Cengkeh, Tangkil, Jengkol dan Mangga
54	SUPRA	HUTAN TUA	Jengkol, Kelapa, Duku dan Durian
55	UDIN	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Jengkol, Durian, Tangkil, Kakau, Petai dan Alpukat
56	UDIN	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Jengkol, Durian, Tangkil, Kakau, Petai dan Alpukat
57	SANTAWI	HUTAN TUA	Kemiri, Durian, Jengkol, Tangkil dan Kelapa
58	SUNTA	HUTAN TUA	Kelapa, Durian, Tangkil, Alpukat, Kakau, dan Cengkeh

59	SALIM	HUTAN TUA	Jengkol, Kelapa, Kemiri, Duku dan Durian
60	UCU S	HUTAN TUA	Durian, Cengkeh, Petai, Nangka, Kemiri, Kelapa dan Duku
61	JULI	HUTAN TUA	Duku, Kemiri, Durian, Petai, l dan Cengkeh
62	MARJAI	HUTAN TUA	Durian, Cengkeh, Tangkil, Jengkol dan Mangga
63	ARMALI	HUTAN TUA	Kemiri, Durian, Jengkol, Tangkil dan Kelapa
64	SARJA	HUTAN TUA	Tangkil, Durian, Kemiri, Petai, Jengkol, Pisang
65	FIRMANSYAH	HUTAN TUA	Jengkol, Kemiri, Tangkil dan Kelapa
66	RONI	HUTAN TUA	Kemiri, Cengkeh dan Jengkol
67	JANDRA	HUTAN TUA	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
68	MARTI	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
69	BAKRI	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
70	HUMAEDI	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
71	NASUHA	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol
72	ATANG	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
73	SIDIN	HUTAN TUA	Cengkeh, Pisang dan jengkol

74	MIKRAB	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
75	ROBIN	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol
76	HASANUDIN	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
77	JAKARIA	HUTAN TUA	Cengkeh, Kelapa, Jengkol, Duku, Tangkai, dan Petai
78	HENOY	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Durian, Petai dan Mangga
79	TITIN	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
80	DADANG	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
81	SUHAENI	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol
82	M. WALKIJO	PILAR	Kemiri, Pisang, Tangkil, Durian, Kelapa, dan Jengkol
83	TAMSAH	SINAR MELATI	Kemiri, Cengkeh, Pisang, Tangkil dan Jengkol
84	HANDI	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
85	KARNAWI	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Durian, Petai dan Mangga
86	MUKTAR	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang, Tangkil dan jengkol
87	M. NUH	PILAR	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
88	SUPENDI	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol

89	TRI YANTO	PILAR	Kemiri, Tangkil, Kopi, Petai, dan Cengkeh
90	SUDARSO	PILAR	Cengkeh, Tangkil, Petai, Jengkol dan Durian
91	SEMAN	PILAR	Kakau, Lada, Durian, dan Alpukat
92	SUKARJO	PILAR	Cengkeh, Tangkil, Petai, dan Durian
93	SUTIKO	PILAR	Kemiri, Tangkil, Kopi, Petai, Mangga, dan Cengkeh
94	SUTINEM	PILAR	Kakau, Durian, Tangkil, Jengkol, Petai, dan cabe
95	KARSO	PILAR	Cengkeh, Jengkol, Pete dan Durian
96	SUMARNI	PILAR	Kakau, Cengkeh, Durian, Tangkil, Jengkol dan Petai
97	WAGIMAN	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
98	PARLAN	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
99	MEDI	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
100	ANDRIYANTO	PILAR	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
101	MINDARTI	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol
102	MUNARJO	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga

103	RIYADI	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
104	HASBUNAH	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
105	KUNAWI	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
106	BANILAN	PILAR	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
107	MARKIN	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol
108	B. SUPRIYADI	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
109	SAMSURI	PILAR	Kemiri, Tangkil, Kopi, Petai, dan Cengkeh
110	ANDI	PILAR	Cengkeh, Tangkil, Petai, Jengkol dan Durian
111	REBO	PILAR	Kakau, Lada, Durian, dan Alpukat
112	JAMIR	PILAR	Cengkeh, Tangkil, Petai, dan Durian
113	JALAL	PILAR	Kemiri, Tangkil, Kopi, Petai, Mangga, dan Cengkeh
114	SYAPRUDIN	PILAR	Kelapa, Duku, Sengon, Petai, Jengkol, Cengkeh, Tangkil dan Durian
115	JUMALI	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga



116	NURMAN	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
117	SAHANI	HUTAN TUA	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
118	UJUNG	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol
119	RATNAWI	HUTAN TUA	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
120	NANI	HUTAN TUA	Kakau, Durian, Tangkil, Jengkol, Petai, dan cabe
121	ROHMAN	PILAR	Cengkeh, Jengkol, Pete dan Durian
122	BAYINATI	PILAR	Kakau, Cengkeh, Kemiri, Jengkol dan Petai
123	MASERAH	PILAR	Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
124	MARIYAM	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
125	KASMIATUN	PILAR	Kelapa, Jengkol, Tangkil dan Kemiri
126	MISNA	PILAR	Cengkeh, Kemiri, Durian dan Jengkol
127	UMINAH	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
128	JONI	PILAR	Pisang, Duku, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
129	BADRUDIN	PILAR	Durian, Tangkil, Kelapa, Pete, Cengkeh dan Kemiri



130	SUPONO	PILAR	Pisang, Duku, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
131	UNAN WIJAYA	PILAR	Kemiri, Tangkil, Jengkol, dan Petai
132	MINAH	PILAR	Durian, Tangkil, Kelapa, Pete, Cengkeh dan Kemiri
133	SALIMI	PILAR	Kakau, Durian, Tangkil, Jengkol, Petai, dan cabe
134	SANUSI	PILAR	Cengkeh, Jengkol, Pete dan Durian
135	SOPARI	PILAR	Kakau, Cengkeh, Kemiri, Durian, Tangkil, Jengkol dan Petai
136	ASAEPUDIN	PILAR	Kemiri, Kelapa, Cengkeh dan Jengkol
137	SITI NINGRUM	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
138	A. SANIMAN	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
139	MARYANI	SUKANEMAH	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
140	ANIM	PILAR	Cengkeh, Jengkol, Pete dan Durian
141	AHMAD SANUSI	RANJI	Kakau, Cengkeh, Kemiri, Durian, Jengkol dan Petai
142	FAHRUDDIN ALI	RANJI	Kemiri, Cengkeh dan Jengkol
143	SANILAN	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian

144	SUKIRNO	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
145	SANTI	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
146	ICAH	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
147	MAYA	PILAR	Pisang, Duku, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
148	NASUHA	PILAR	Kemiri, Tangkil, Jengkol, dan Petai
149	JUNAIDI	PILAR	Durian, Tangkil, Kelapa, Pete, Cengkeh dan Kemiri
150	MISRA	PILAR	Kemiri, Cengkeh, Petai dan Jengkol
151	SARKAH	HUTAN TUA	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
152	SURAJI	PILAR	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan Mangga
153	JUNAIDI	HUTAN TUA	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
154	ASWANDI	RANJI	Durian, Tangkil, Kelapa, Pete, Cengkeh dan Kemiri
155	ROHMAD	DOSERAN LK2	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
156	SABAR	Gg.KAMBOJA Lk1	Cengkeh, Jengkol, Pete dan Durian
157	ISNAINI	Gn. JAHA LK 1	Kakau, Cengkeh, Kemiri, Durian, Tangkil, Jengkol dan

158	SUMARNA	Gg.KAMBOJA Lk2	Kemiri, Cengkeh dan Jengkol
159	MARJUK	SRENGSEM LK 2	Kemiri, Cengkeh dan Jengkol
160	HARLAN	Gg.KAMBOJA Lk2	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
161	MUDIN	Gg.KENANGA Lk2	Kelapa, Cengkeh, Tangkil, Jengkol, Durian, Petai dan
162	BAHFULLAH	Gg.KAMBOJA Lk1	Cengkeh, Kemiri, Durian, Pisang dan jengkol
163	KUSWONO	DOSERAN LK2	Durian, Tangkil, Kelapa, Pete, Cengkeh dan Kemiri
164	ROHEMI	PILAR	Cengkeh, Jengkol, Durian dan Petai
165	M. JAMIAN	PILAR	Tangkil, Kemiri, Cengkeh, Petai dan Durian
166	UJANG ROSID	PILAR\	Pisang, Duku, Tangkil, Jengkol dan Cengkeh
167	MUSTOFA	PILAR	Kemiri, Tangkil, Jengkol, dan Petai
168	W. MAD SURI	HUTAN TUA	Durian, Tangkil, Kelapa, Pete, Cengkeh dan Kemiri

**Sumber:** Data KPH Gn. Rajabasa-Way pisang-Batu Serampok Tahun 2016







